

Sikap dan kepentingan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyumas dalam perumusan Perda No. 15 tahun 2014 tentang pengendalian, pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol = Attitudes and interests of DPC PDI Perjuangan in Banyumas Regency in the formulation of regional regulation No. 15 year 2014 on restraint, supervision, and distribution control of circulation of alcoholic beverages

Chanifia Izza Millata, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20481519&lokasi=lokal>

Abstrak

Perda pengendalian minuman beralkohol di Banyumas yang diterbitkan tahun 2014 pada awalnya memunculkan perbedaan pendapat dalam internal PDI Perjuangan di Banyumas. Perda ini merupakan hasil tuntutan oleh beberapa ormas Islam di Banyumas, seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah. PDI Perjuangan sebagai partai penguasa di Banyumas sejak reformasi terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu yang setuju dan tidak setuju dengan adanya perumusan Perda tersebut. Kubu tidak setuju beranggapan bahwa isu minuman beralkohol bukan lah isu yang dibawa oleh PDI Perjuangan. Hal ini juga akan merugikan konstituen PDI Perjuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan komunikasi, akhirnya terjadi kompromi antara kedua pihak, yaitu tidak dibahasnya *ciu Cikakak* (minuman beralkohol tradisional khas Banyumas) dalam substansi perda. Selain itu, PDI Perjuangan menganggap bahwa isu pengendalian minuman beralkohol bukanlah perda syariah. Dukungan PDI Perjuangan terhadap perda ini merupakan strategi partai untuk mempertahankan konstituen mereka, yaitu dari kelompok masyarakat Islam yang menuntut untuk diterbitkan perda pengendalian minuman beralkohol dan juga dari kelompok perajin minuman beralkohol tradisional di Banyumas. PDI Perjuangan ingin menampilkan citra yang lebih religius di hadapan masyarakat Islam di Banyumas. Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu strategi politik Peter Schroder.

.....The regulation on controlling alcoholic beverages in Banyumas, which was published in 2014, initially raised debates in PDI Perjuangan internally in Banyumas. This regulation is the reaction to protests by several Islamic organizations in Banyumas, such as MUI, NU, and Muhammadiyah. PDI Perjuangan as the ruling party in Banyumas which is reformed is divided into two parties, namely those who agree and those who do not agree with the formulation of the regulation. The faction does not agree to assume that the issue of alcoholic beverages is not an issue brought by PDI Perjuangan. This will also harm PDI Perjuangan constituents. The method used in this research is qualitative method. The results showed that after communication, a compromise finally occurred between the two parties, namely not discussing *ciu Cikakak* (a traditional alcoholic beverage typical of Banyumas) in the substance of the regulation. In addition, the PDI Perjuangan considers that the issue of alcoholic control resolves sharia regulations. PDI Perjuanganans support for this regulation is the partys strategy to defend their constituents, namely from Islamic community groups that demand the prohibition of alcoholic drinks and also from groups of traditional alcoholic drinkers in Banyumas. PDI Perjuangan wants to display a more religious image before the Islamic

community in Banyumas. This is in accordance with the theory used in this study, namely Peter Schroders political strategy.